

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN SUMEDANG

Indra Wahyudinata*¹, Abdul Jalil², Daffa Nugraha³, Racka Nandra Gumilar⁴, Rafli Fathurrohman⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Nov 12, 2023

Revised Des 15, 2023

Accepted Des 23, 2023

Keywords:

Public Policy

Policy Implementation

Teacher Certification

ABSTRACT

Education is the most important aspect in efforts to optimize human resource services, in order to be able to compete amidst the competencies of an increasingly advanced and modern nation. Sumedang Regency Education Office by optimizing education services through implementing the teacher certification policy regulated in Permendiknas No. 11 of 2011 concerning in-service teacher certification and the latest Regulation of the Minister of Education and Culture No. 37 of 2017 concerning certification for teachers in positions which aims to increase teacher professionalism in carrying out their duties and functions. The aims of this study were 1) to examine and describe the implementation of the primary school teacher certification policy at the Sumedang District Education Office, in terms of communication, resources, position, and organizational structure. 2) To find out the efforts made by the Sumedang district education office to overcome the teacher's ability to use IT. This research is a qualitative type using a phenomenological approach with data collection techniques through structured interviews, observation and documentation. The results of the study show that 1) of the four aspects of communication, resources, disposition and organizational structure, the fourth shows that the implementation has been well implemented, so that overall the implementation of the primary school teacher certification policy in Sumedang district is considered to have gone well. 2) the determinant factors supporting the success of the primary school teacher certification policy in Sumedang district which are considered well implemented due to organizational structure factors that have occurred a good division of tasks and the existence of procedural operational standards (SOP) or technical certification manuals. Apart from that, another supporting factor is the aspect of communication carried out through various socialization activities. 3) Efforts by the education office to overcome teachers' abilities in using IT, namely through technical guidance activities (BIMTEK) related to offline and online based teacher certification implementation systems.



Copyright © 2023 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Indra Wahyudinata

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Email: indra_wahyudinata@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu bangsa. Pendidikan mempunyai peranan yang strategis dalam menentukan kualitas suatu bangsa. Bangsa yang berkualitas ditandai dengan pendidikan yang berkualitas dari semua segi. Baik dari segi fasilitas, sumber daya pengajar, kurikulum, pendanaan dan kebijakan. Untuk hal yang terakhir, kebijakan berperan secara makro dalam pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Tentu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu adalah tanggung jawab pemerintah dan kebijakan pendidikan yang merata adalah salah satu caranya.

Implementasi kebijakan pendidikan satu guru yang baik, yang kedua metode yang baik dan yang ketiga penunjang yang baik. Kemudian angka 3 yang kedua satu open mind, kedua super effort, ketiga continuous improvement dan angka 4 yang pertama bertransformasi, dari hanya fokus kepada kelas berpindah pada individu. Yang kedua hanya menekankan ketuntasan kurikulum di dalam kelas untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Yang ketiga bertransformasi dari manual, kepada digital dan yang keempat anti perubahan mampu berselancar didalam era disruption.

Strategi komplementer 7 metode pembelajaran holistik integratif memberikan warna yang berbeda bagi Pendidikan di Kabupaten Sumedang. Pembelajaran tematik dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar menumbuhkan nilai-nilai kearifan lokal ini sangat relevan dengan kebijakan Pemerintah dalam implementasi kurikulum merdeka.

Sertifikasi Guru atau Sergur merupakan sebuah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar disekolah. Seorang guru yang sudah sertifikat, akan memiliki nilai lebih yang dapat digunakan sebagai nilai tambah ketika seorang guru ini diberikan kepada tenaga pendidik yang sudah memenuhi syarat.

Syarat-syarat Sertifikasi Guru menurut Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan :

1. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau Diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi. Bagi tenaga pendidik yang tidak atau belum memiliki ijazah S1 atau minimal D-IV maka belum bisa mendaftar untuk sertifikasi guru.
2. Guru dalam jabatan atau Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat. Dengan kata lain, tenaga pendidik ini sudah diakui sebagai salah satu guru dalam salah satu lembaga pendidikan baik negeri ataupun swasta.
3. Seorang Guru yang akan mendaftar Sertifikasi Guru, maka setidaknya, sudah berpengalaman mengajar minimal 5 tahun dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda tapi masih dalam satu ruang lingkup yayasan yang sama.
4. Guru bukan PNS yang memiliki status guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang diangkat oleh Pemda yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
5. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga kependidikan (NUPTK). NUPTK merupakan nomor induk yang diberikan kepada seorang pendidik (guru) dan Tenaga Kependidikan, baik dari kalangan PNS maupun non PNS. NUPTK ini terdiri dari 16 digit dan tidak akan berubah meskipun tenaga pendidik berpindah-pindah sekolah.

Ketika sudah memenuhi syarat-syarat diatas, maka tenaga pendidik (guru) bisa mengajukan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat mengajar. Sertifikasi Guru ini tentunya memiliki manfaat untuk guru itu sendiri. Diataranya melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru. Dengan adanya sertifikasi guru ini juga dapat digunakan sebagai bentuk penilaian masyarakat terhadap tenaga pendidik di lingkungan sekitar. Sehingga dapat melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.

Namun berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, ternyata diketahui bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan dalam upaya sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi sebagai berikut.

1. Belum adanya pengawas yang memiliki sertifikat diklat kepengawasan, hal ini dibuktikan dengan masih minimnya pegawai yang mengikuti pelatihan, dan Dinas Pendidikan Sekolah Dasar pada khususnya belum ada pengawas yang bersertifikat pengawas. Dikarenakan belum adanya sekolah atau perguruan tinggi yang mengkhususkan bagi pendidikan pengawas, tetapi untuk pelatihan bagi guru yang ingin berpindah profesi menjadi pengawas sudah dilaksanakan dan sudah sering diadakan atau diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Kebanyakan para pengawas diambil dari para guru-guru serta Kepala Sekolah yang ingin berpindah menjadi pengawas itupun dengan melakukan seleksi kelayakan oleh Dinas Pendidikan Sekolah Dasar, tertera pada Renstra Tahun 2018-2023, hal tersebut disampaikan oleh PTK Pelayanan Bidang Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten

Sumedang.

2. Pemerataan dan penataan guru belum optimal, hal ini dapat dilihat dari lemahnya perencanaan program yang berpotensi menghambat proses implementasi, mekanisme pelaksanaan belum optimal, serta monitoring belum terlaksana dengan baik. Demikian, pelaksana kebijakan telah diorganisasikan dalam struktur yang terkordinasi. Implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru memberikan dampak terhadap peningkatan kompetensi atau kualifikasi guru dan mutu pendidikan. Permasalahan kelebihan dan kelemahan guru sudah dapat diatasi namun belum merata untuk setiap mata pelajaran, satuan pendidikan dan antar wilayah kabupaten atau kota. hal tersebut disampaikan oleh PTK Pelayanan Bidang Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
3. Belum optimalnya peningkatan profesi dan karir tenaga pendidik, hal ini di buktikan dengan peningkatan kualitas profesi guru dapat diselenggarakan melalui pengembangan profesionalisme baik yang berupa seminar dan lokakarya maupun yang dilakukan secara daring melalui sosial media. Untuk menjawab tantangan di era revolusi digital guru juga perlu meningkatkan keterampilan dalam hal penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas profesi guru dan daya tarik pembelajaran. Pemberian sertifikasi pendidik dan tunjangan sertifikasi guru dapat digunakan juga untuk memperbaiki kualitas profesi guru. Selain itu guru perlu juga didorong untuk meningkatkan kemampuan dalam meneliti dan menggunakan bahasa Inggris. Pada akhirnya pemerintah perlu membuat keputusan untuk mendorong perbaikan kualitas profesi guru yang akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penyelenggaraan pengembangan profesionalisme kualitas profesi guru sebaiknya dilaksanakan baik oleh sekolah maupun organisasi. Dengan demikian kualitas profesi guru memang harus berperan aktif dalam kegiatan pengembangan profesionalisme, hal ini erat kaitannya dengan pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan oleh kualitas profesi guru untuk meningkatkan pembelajaran yang di lakukan. hal tersebut disampaikan oleh PTK Pelayanan Bidang Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Berlandaskan latar belakang permasalahan yang ditentukan selama observasi awal di lapangan, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sumedang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar di Kabupaten Sumedang.

2. METHOD

Dalam penelitian ini yang diamati adalah Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Sekolah Dasar Dalam Upaya Optimalisasi Sertifikasi Guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, diharapkan data yang didapat lebih lengkap serta bermakna dan pasti, hal ini sesuai dengan pendapat seorang ahli yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017), yaitu dengan digunakan metode kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penggunaan metode kualitatif ini bukan karena metode kualitatif ini baru dan lebih (*trendy*), tetapi memang permasalahan lebih tepat jawabannya dicairkan dengan metode kualitatif.

Dalam rangka memperoleh informasi yang akurat serta data diperoleh dari informan serta sampel. Informan adalah pegawai yang benar-benar memahami permasalahan dengan argumen bahwa mereka mengetahui banyak mengenai fenomena yang terjadi dilapangan, sedangkan sampel adalah wakil dari populasi yang akan diteliti.

Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah dengan menggunakan *Purposive Sampling*, menurut Sugiyono (2017:216) mengatakan bahwa *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Adapun yang ditentukan menjadi informan dalam penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi serta terlibat di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Maka yang dijadikan sebagai informan atau sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Unsur	Jumlah
1.	Kepala Bidang Sekolah Dasar	1
2.	Pelaksana Bidang Sekolah Dasar	1
3.	Pelaksana Bidang Sekolah Dasar	1
Jumlah		3

Penyusun mengambil sejumlah 4 orang tersebut diatas berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan berkompeten dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang baik secara keseluruhan maupun sebagian tergantung tupoksi dan tingkat wewenang serta tanggung jawabnya.

Teori yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III (Nugroho, 2017) yang terdiri dari:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi pelaksana
4. Standar operasional prosedur

Untuk menunjang metode yang digunakan guna memperoleh informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017), sebagai berikut :

1. Teknik pengumpulan data sekunder, melalui Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur, buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan yang berlaku, laporan-laporan, arsip serta dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan menunjang kelancaran pencairan data.
2. Teknik pengumpulan data primer, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dilapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditepuh dengan mengacu kepada teknik analisis data Model Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2017), yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Mutu pendidikan di Indonesia saat ini belum dikatakan baik dan berkualitas bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang dengan perlahan-lahan mereka mampu meningkatkan kualitas pendidikannya sehingga dapat meninggalkan negara Indonesia dalam kualitas pendidikan sebuah bangsa. Contoh sederhana adalah Malaysia yang dulu banyak mengimpor tenaga pendidik dari Indonesia namun sekarang telah mampu secara mandiri melaksanakan pendidikan secara berkualitas untuk warga negaranya. Berbicara mengenai kualitas pendidikan tidak akan lepas dari sosok guru sebagai orang mengamalkan dirinya dalam dunia pendidikan. Di salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tepatnya di Kabupaten Sumedang terdapat guru-guru yang masih kesulitan mengikuti program sertifikasi guru seperti dari data yang penulis dapatkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, yakni masih banyak guru-guru yang belum memiliki sertifikasi atau sertifikat guru dan banyak juga pengawas yang masih belum mendapat sertifikasi guru. Indikator masalahnya bahwa karakteristik dan kemampuan agen pelaksanaan dalam kebijakan sertifikasi guru dilihat dari aturan sertifikasi pemerintah pusat yang dikeluarkan pada peraturan menteri No. 11 Tahun 2011 mengenai sertifikasi guru dalam jabatan sedangkan pada tingkat daerah masih belum mempunyai peraturan daerah mengenai serifikasi guru seras banyak guru yang tidak linear berpotensi menjadi masalah yang cukup besar kedepannya.

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar disuatu instansi pemerintah tentunya sangat memerlukan sistem dan mekanisme yang baik. Untuk menghasilkan guru yang profesional yang baik tentunya harus dengan cara yang dan sistem yang baik pula. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana dan konsistensi, tidak terkecuali di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar.

Implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar di Kabupaten Sumedang telah berjalan cukup baik. Dari keempat dimensi implementasi kebijakan menurut Edward III (Nugroho, 2017) menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Dimensi Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang khususnya Bidang Sekolah Dasar telah dilakukan dengan baik. Kebijakan sertifikasi guru disosialisasikan dan isi dari kebijakan tersebut sudah jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi terkait kebijakan sertifikasi guru dilakukan kepada guru, penawas, kepala sekolah, dan yang berhak mendapatkan sertifikasi guru. Kejelasan tentang kebijakan sertifikasi guru pada bidang sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang selalu mengacu kepada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka, dan lain sebagainya (Mahyuddin, 2019). Dalam suatu kebijakan diperlukan komunikasi guna menyebarluaskan

informasi terkait isi kebijakan tersebut. Sehingga sosialisasi kebijakan diperlukan dalam implementasi kebijakan.

2. Dimensi Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten. Tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan cukup baik dan sumber daya manusia itu sendiri berada di setiap bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, setiap bidang dikelola oleh satu orang kepala seksi dan satu operator sertifikasi dan dibantu oleh pelaksana honorer data orang. Setiap pelaksana kebijakan sertifikasi guru akan diberikan wewenang oleh kepala seksi untuk melaksanakan program sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Wewenang yang diberikan yaitu pelaksana berhak untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dan melaksanakan rapat koordinasi dengan Balai Besar serta Kementerian. Anggaran atau biaya untuk pelaksanaan program sertifikasi guru belum mencukupi apalagi pada tahun 2023 dimana anggaran untuk sosialisasi dihapuskan.

3. Dimensi Disposisi Pelaksana

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, kecenderungan atau perilaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh (Metter dan Horn, 2003). Disposisi bisa diartikan sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor yang di dalamnya mencakup komitmen dan kejujuran. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik maka kebijakan tersebut akan dilaksanakan dengan baik. Jika penerapan kebijakan secara efektif, pelaksana bukan yang harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya, serta mereka juga mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Respon pelaksana kebijakan sertifikasi guru ada dua melalui penilaian portofolio bagi guru dalam jabatan dan melalui pendidikan profesi bagi calon guru. Kebijakan sertifikasi guru ini bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Bagi pelaksana kebijakan sertifikasi guru dalam hal ini guru tentunya memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan ini. Para guru sertifikasi bertanggung jawab untuk membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan tiap triwulan sekali. Agar tanggung jawab guru sertifikasi dalam melaksanakan tugas mengajar lebih baik lagi maka kepala sekolah harus memberikan arahan dan masukan kepada guru apabila ada kendala yang dialami oleh guru sehubungan dengan proses pembelajaran.

4. Dimensi Standar Operasional Prosedur

Setiap organisasi baik pemerintah ataupun swasta tentunya memerlukan sebuah panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen. Standar operasional prosedur merupakan panduan yang digunakan untuk mengetahui kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar.

Standar operasional prosedur terkait sertifikasi guru dibuat dengan merujuk pada kebijakan dari Kementerian dan peraturan kepala dinas. Di dalam standar operasional prosedur tersebut dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumedang.

4. CONCLUSION

Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bidang sekolah dasar dalam upaya optimalisasi pelayanan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sudah berjalan cukup baik, kebijakan sertifikasi guru disosialisasikan secara terstruktur dari mulai Kepala sekolah, pengawas sekolah, hingga kepada para guru. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam menyelenggarakan program sertifikasi guru mengacu kepada kebijakan dari pemerintah dan kemendikbudristekdikti RI dan standar operasional prosedur (SOP) turunan yang dibuat oleh kemendikbudristek mengenai sertifikasi guru dan dijabarkan kembali melalui peraturan kepala dinas, dengan dibantu dengan sumber daya manusia yang cukup baik dan sudah memenuhi standar, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan program sertifikasi guru sudah cukup baik.

REFERENCES

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Gaol, Jimmy. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Hadjar, Ibnu. 1996. *Dasar-dasar Metode penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. [online]. Tersedia: <http://etheses.uin-msalang.ac.id>. [28 Desember 2022].
- Handoko, Hani. 1999. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- McDavid, James C., Huse, Irene, Hawthorn, Laura R. L. 2019. *Program Evaluation and Performance Measurement (3rd ed)*. Los Angeles: Sage.
- Mertens, Donna M., Wilson, Amy T. 2019. *Program Evaluation Theory and Practice (2nd ed)*. New York: The Guilford Press.
- Keban, Yermias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nugraha, A. 2014. *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kota Serang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Purwanto, Erwan A., dan Sulistyani Dyah R. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, Riky Ramansyah. 2020. *Implementasi Kebijakan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Mengeah (UMKM) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang*. Prodi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA).
- Siagian, P. Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suswanta., Ramdhani, P. 2019. *Implementation Of Government Program In Facilitating Employment Opportunities For Persons With Disabilities In Special Region Of Yogyakarta*, 6(3), 319-340.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Puslit KP2W Lembang Alfabeta Penelitian Unpad.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.